

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari masyarakat yang beraneka ragam, dengan keinginan bersama menyatukan diri dalam satu bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika (satu di dalam keanekaragamannya). Berjuta-juta manusia hidup diseluruh kawasan Nusantara, terdiri dari berbagai kesatuan-kesatuan kelompok suku dan masing-masing memiliki konfigurasi budaya yang berbeda. Keanekaragaman ini semakin bertambah ketika arus imigran orang asing mulai mengalir memasuki Indonesia dan kemudian menetap disini. Orang-orang asing tersebut antara lain berasal dari Cina, India, Arab, dan Eropa (Husodo,1985:40).

Etnis Cina yang dahulu sering disebut *Chinese Overseas* atau Cina perantauan, sudah sejak lama tersebar di berbagai wilayah di dunia. Jumlah terbesar dari etnis Cina yang melakukan perantauan berada di Asia Tenggara (Suryadinata, 2002: 7-8). Mayoritas etnis Cina di Asia Tenggara adalah penduduk perkotaan yang sering terlibat dalam kegiatan perdagangan dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Tetapi, warga yang sudah lama menetap tampaknya telah berganti profesi, sedangkan para imigran baru masih tetap aktif dalam sektor komersil (Cushman,1991:291).

Batavia merupakan tempat bertemunya berbagai kelompok atau etnis dari berbagai penjuru dunia. Kelompok-kelompok etnis tersebut satu sama lain saling berinteraksi melalui hubungan kerjasama terutama dalam bidang ekonomi. Kenyataan tersebut telah ditunjukkan dengan baik pada masa kolonial maupun sebelum kolonial. Salah satu etnis yang telah lama mendiami Batavia adalah etnis Cina.

Para pendatang baru non pribumi di Batavia ditempatkan terpisah di berbagai permukiman, terutama di luar tembok kota, di *Ommelanden*. Dengan

memberikan tanah kepada para pemimpin kelompok nonpribumi sebagai milik pribadi, VOC bisa mendapatkan keamanan sekaligus keuntungan ekonomi. Setiap kelompok membentuk semacam kompi dan hidup bersama menurut adat istiadat dan kepercayaan mereka masing-masing, mereka juga memilih kepala kampung anggota masyarakat mereka yang dianggap cakap (Peter, 2007: 123-124).

Sejak zaman kolonial etnis Cina telah menjadi mitra kekuasaan kolonial dalam pembangunan ekonomi, sedangkan golongan raja-raja atau kaum priyayi menjadi mitra dalam penyusunan kekuasaan feodal-kolonial. Akan tetapi Ketika kekuasaan kolonial di Asia Tenggara melepaskan kedudukannya yang bersifat monopolis, etnis Cina mengantisipasi perubahan tersebut dengan ikut serta masuk ke dalam sektor bisnis swasta (Onghokham, 2008:40).

Etnis Cina di Hindia Belanda terbagi kedalam dua kelompok, yaitu Cina *totok* dan *peranakan*. Orang Cina *totok* adalah orang Cina yang baru menetap di Hindia Belanda selama satu generasi ataupun dua generasi, sedangkan Cina *peranakan* adalah orang Cina yang telah lama menetap di Indonesia selama tiga generasi ataupun lebih (Hariyono, 1994: 33).

Masalah-masalah mengenai status sipil etnis Cina di Hindia Belanda adalah salah satu warisan yang ruwet dari zaman pemerintahan Hindia Belanda. Perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda tahun 1854 menggolongkan etnis Cina sama dengan “orang-orang pribumi”, pada tingkat yang lebih rendah daripada orang-orang Eropa (Paulus, 1976: 19). Pertengahan abad ke 19, suatu konsep mengenai *Nederlandschap* (Kebangsaan Belanda) dirumuskan dalam Undang-Undang pokok Belanda. Konsep ini memandang orang Belanda, keturunan Belanda, pribumi dan orang Asia (Cina dan Arab) yang lahir di Hindia Belanda sebagai *Nederlander* (berkebangsaan Belanda). Akan tetapi “kebangsaan” ini tidak berarti apa-apa bagi masyarakat pribumi dan bagi orang Asia yang lahir di Hindia Belanda, karena tidak disertai oleh hak yang sama sebagaimana yang didapat oleh orang Belanda (Suryadinata: 1986, 41).

Sekalipun etnis Cina peranakan sebagian terasimilasi ke dalam masyarakat Hindia Belanda, akan tetapi mereka masih tetap terpisah dari golongan-golongan

etnis lainnya. Hal ini terjadi, karena sebagai akibat dari struktur masyarakat kolonial dan politik pecah-belah pemerintah Hindia Belanda. Selain politik pecah-belah, pemerintah Hindia Belanda juga memberlakukan sistem *apartheid* terhadap masyarakat etnis Cina di Batavia. Sistem *apartheid* ini, menggolongkan masyarakat Hindia Belanda menjadi tiga golongan yakni: *pertama* golongan Eropa atau Belanda, *Kedua* golongan Timur Asing (Cina, Arab, India), dan *ketiga* golongan Pribumi (Onghokham, 2008: 3-4). Pendapat yang sama mengenai penggolongan masyarakat Hindia Belanda di Batavia juga dikemukakan oleh Lubis (2004: 80) sebagai berikut:

Penduduk di zaman Hindia Belanda dibagi atas tiga golongan berdasarkan hukum. Pembagian ini mencerminkan status sosial masing-masing dari ke tiga golongan penduduk tersebut. Golongan pertama ialah penduduk Eropa atau disebut *Europeanen*, mereka mempunyai hukum sendiri dan merupakan kasta tertinggi diantara penduduk di Hindia Belanda. Golongan kedua ialah penduduk Timur Asing atau yang disebut *vreemdeosterlingen*, mereka merupakan penduduk yang berasal dari Asia seperti orang Cina, Arab, dan India. Sedangkan golongan yang ke Tiga golongan paling bawah status sosialnya ialah *Inlanders* atau pribumi.

Sistem hukum yang berlaku pada masa pemerintahan Hindia Belanda, memaksakan diskriminasi terhadap masyarakat etnis Cina dengan berbagai cara. Berkenaan dengan masalah hukum, masyarakat etnis Cina bersama dengan masyarakat Timur Asing lainnya dikelompokkan ke dalam lapisan masyarakat pribumi. Masyarakat etnis Cina diadili di pengadilan polisi (*politierol*) untuk pelanggaran kriminal kecil, dan di pengadilan pribumi (*Landraad*) untuk pelanggaran-pelanggaran berat (Suryadinata, 1986: 21-22).

Sistem pemukiman (*wijkenstelsel*) untuk masyarakat etnis Cina berhubungan erat dengan sistem opsir, dengan kata lain bahwa masyarakat etnis Cina diurus oleh kepala kelompok ras mereka dan diwajibkan untuk tinggal di daerah tertentu jauh dari etnis lain. Sistem pemukiman ini (*wijkenstelsel*) melarang masyarakat etnis Cina untuk hidup diantara orang-orang pribumi, dan hal ini membatasi komunikasi antara masyarakat etnis Cina dengan etnis lainnya. Sistem pemukiman (*wijkenstelsel*) ini juga baru memperbolehkan masyarakat etnis Cina meninggalkan tempat tinggal apabila memiliki "*pas jalan*". Sistem pas

jalan (*Passenstelsel*) ini diberikan oleh pejabat Belanda untuk kepentingan perdagangan dan industri atau usaha yang berguna bagi pemerintah Hindia Belanda, tetapi pas jalan ini bisa dicabut segera untuk kepentingan keamanan umum (Suryadinata, 2002: 75-76).

Lubis (2004, 81-82) juga mengungkapkan bahwa:

Pada abad ke 19, masyarakat etnis Cina hanya diizinkan tinggal di daerah Glodok (pada saat ini), yang diperuntukan khusus untuk mereka. Oleh Belanda pemukiman khusus masyarakat etnis Cina disebut *Chineesche wijk*, seperti peraturan pemukiman *ghetto* bagi kaum Yahudi di kota-kota Eropa. Ketika masyarakat etnis Cina akan pergi keluar dari tempat tinggalnya diharuskan membawa semacam surat jalan atau pas jalan.

Di Batavia, sebagaimana halnya di tempat-tempat lain di Indonesia etnis Cina mempunyai kepala masyarakat sendiri dan hidup dalam daerah yang terkenal dengan nama pencinaan. Kapitan etnis Cina ditunjuk sebagai opsir (*officer*) bangsanya. Para Opsir terdiri dari seorang kapitan, letnan dan mayor Cina. Para Opsir tersebut ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda dan secara teknik tidak dapat dianggap sebagai wakil yang sah dari masyarakat Cina. Akan tetapi, para opsir Cina biasanya merupakan orang yang sangat kaya diantara etnis Cina lainnya dan kekayaan biasanya merupakan suatu ukuran akan penghargaan yang tinggi dan pengaruh diantara etnis Cina (Onghokham, 1991: 33).

Para opsir Cina ini tidak digaji, mereka adalah pedagang yang menggunakan posisi ini untuk memperbaiki bisnis mereka. Para opsir Cina bekerja di kantor yang bernama *Kong Koan* (Gong Guan) dan bertugas sebagai pengatur administrasi, misalnya menjelaskan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat etnis Cina, dan mengumpulkan pajak dari masyarakat etnis Cina (Suryadinata, 2002: 74). Tugas lain dari seorang opsir Cina selain pemungut pajak adalah bertugas untuk mengusahakan pegadaian, memonopoli garam dan perdagangan candu atas nama pemerintah Hindia Belanda (Paulus, 1976: 12).

Mengenai masalah asimilasi masyarakat etnis Cina ke dalam masyarakat Hindia Belanda merupakan masalah yang sulit dilakukan. Penyebab utama timbulnya masalah ini antara lain, karena masyarakat etnis Cina yang masih



merasa dirinya lebih dari masyarakat pribumi. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat etnis Cina sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda hingga saat ini cenderung hidup terpisah, menjaga jarak dan membentuk garis pemisah dengan masyarakat pribumi (Husodo, 1985: 73). Masalah yang timbul antara masyarakat pribumi dengan masyarakat etnis Cina sering kali terjadi, terbukti dengan adanya sejumlah tindakan-tindakan kekerasan, bentrokan-bentrokan fisik serta serangkaian tindakan ekstrim lainnya. Peristiwa penjarahan dan pembantaian pertama kali terjadi yakni pada tahun 1740, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yang terjadi pada tahun 1940 dan pada tahun 1941 seperti di Pati, Rembang, Semarang, Unggaran, Kartasura, Banyumas, Cirebon, dan Penang (Poeze, 2008: 86).

Berbagai persoalan dan ketimpangan sosial yang terjadi diantara masyarakat etnis Cina dengan masyarakat pribumi merupakan warisan yang belum bisa terselesaikan sampai saat ini. Kemajuan dan kesuksesan masyarakat etnis Cina dalam bidang perekonomian, merupakan persoalan yang masih menjadi sorotan masyarakat pribumi. Keresahan inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai persoalan yang berhubungan dengan masyarakat Etnis Cina di Indonesia, serta keterkaitan antara opsir Cina dengan pemerintahan Hindia Belanda dalam pengaturan kehidupan etnis Cina di Batavia menarik untuk dikaji lebih dalam.

Mengingat sepengetahuan penulis, telah ada penulisan mengenai opsir Cina di Batavia oleh salah seorang mahasiswa UNPAD (Universitas Padjadjaran) yang bernama Gunawan dan juga penulisan dalam bentuk buku yang ditulis oleh Mona Lohanda. Penulisan skripsi sebelumnya yang di tulis oleh Gunawan mahasiswa UNPAD yang berjudul "Pro-Kontra Penghapusan Kelembagaan Opsir Cina di Batavia pada tahun 1910-1942". Skripsi ini lebih banyak membahas mengenai kepemimpinan opsir Cina serta berbagai pendapat dari masyarakat etnis Cina terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang menghapus sistem opsir Cina di wilayah kepemimpinannya termasuk wilayah Batavia. Kelemahan skripsi ini, penulis melihat bahwa skripsi ini masih minim sumber dan belum terlalu

dalam membahas mengenai kedudukan opsir Cina dalam pemerintahan Hindia Belanda.

Kesamaan angka tahun pada skripsi ini, adalah keinginan penulis sendiri yang merasa tertarik setelah membaca skripsi sebelumnya yang menggunakan angka tahun yang sama. Alasan penulis mengambil angka tahun yang sama karena pada tahun 1910 adalah awal di mana masyarakat etnis Cina memiliki dua kewarganegaraan yakni sebagai masyarakat Kekaisaran Cina dan masyarakat Hindia Belanda, sehingga hal ini menjadi polemik dan berpengaruh terhadap sistem lembaga opsir Cina yang berada di Hindia Belanda. Tahun 1942 merupakan momentum di mana pemerintah Hindia Belanda berakhir dan berganti kekuasaan dengan pendudukan Jepang di Hindia Belanda pada umumnya dan Batavia pada khususnya.

Buku Mona Lohanda yang berjudul “The Kapitan *Cina* of Batavia 1837-1942”, buku menjelaskan tentang sejarah berdirinya lembaga opsir Cina, masa kepemimpinan para opsir Cina, hingga berakhirnya lembaga opsir Cina di Batavia, namun di dalam buku Mona Lohanda ini tidak dijelaskan secara mendalam mengenai kedudukan Opsir Cina di Batavia pada tahun 1942-1910. Perbedaan antara buku yang ditulis oleh Mona Lohanda dengan skripsi ini adalah penjelasan secara mendalam mengenai berbagai kebijakan serta kedudukan opsir Cina di dalam pemerintahan Hindia Belanda.

Sebagai seorang mahasiswi jurusan sejarah yang telah mempelajari perkuliahan Sejarah Peradaban Timur serta Sejarah Kolonialisme Barat, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kehidupan masyarakat etnis Cina pada masa pemerintahan kolonialisme terutama pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Penulis juga merasa tertarik dengan adanya fakta sejarah tentang perbedaan perlakuan pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat Timur Asing (Arab, Cina, India) dengan masyarakat pribumi, dan juga untuk mengetahui pola hubungan antara pemerintah Hindia Belanda dengan masyarakat Etnis Cina sehingga menjadi mitra kerja dalam bidang ekonomi.

Berdasarkan beberapa pokok pemikiran serta latar belakang rumusan penulisan yang penulis paparkan, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji

masalah lebih dalam mengenai berbagai kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat etnis Cina di Batavia pada tahun 1910-1942. Oleh sebab itu, judul skripsi ini adalah “Kedudukan Opsir Cina dalam Pemerintahan Hindia Belanda di Batavia antara tahun 1910-1942”.

## **I.2 Rumusan dan Batasan Masalah**

Berdasarkan beberapa pokok pemikiran yang dipaparkan di atas, terdapat permasalahan utama yang akan dikaji yaitu “Bagaimana kedudukan dan hubungan Opsir Cina dengan pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Batavia pada tahun 1910-1942?”. Dan untuk membatasi kajian penelitian ini, maka diajukan beberapa pertanyaan sekaligus sebagai rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalah yang di maksud adalah:

1. Bagaimana kehidupan masyarakat Etnis Cina di Batavia antara tahun 1910-1942?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat etnis Cina di Batavia antara tahun 1910-1942?
3. Bagaimana perkembangan Lembaga opsir Cina di Batavia antara tahun 1910-1942?
4. Bagaimana peranan Lembaga Opsir Cina dalam pemerintahan Hindia Belanda?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Mendeskripsikan kehidupan masyarakat etnis Cina di Batavia antara tahun 1910-1942.
2. Menjelaskan kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat Etnis Cina di Batavia antara tahun 1910-1942.
3. Menganalisis perkembangan Lembaga Opsir Cina di Batavia antara tahun 1910-1942.

4. Memaparkan peranan Lembaga Opsir Cina dalam pemerintahan Hindia Belanda.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Dengan mengkaji pembahasan mengenai “Kedudukan Opsir Cina dalam Pemerintahan Hindia Belanda di Batavia Tahun 1910-1942”, terdapat beberapa manfaat yang dirasakan penulis diantaranya adalah:

1. Memperkaya penulisan mengenai sejarah kolonialisme di Indonesia terutama pada akhir abad 19 dan awal abad 20.
2. Memberikan kontribusi dalam penelitian sejarah, khususnya mengenai sejarah Opsir Cina dalam Pemerintahan Hindia Belanda di Batavia.
3. Memberikan gambaran mengenai hubungan etnis Cina dengan pemerintah Hindia Belanda di Batavia.
4. Memberikan kontribusi materi dalam pembelajaran Sejarah di SMA (Sekolah Menengah Atas), terutama bagi peserta didik kelas XI semester II. Sesuai SK 2 : Menganalisis Perkembangan Bangsa Indonesia Sejak Masuknya Pengaruh Barat Sampai dengan Pendudukan Jepang, dengan KD 2.1: Menganalisis Perkembangan Pengaruh Barat dan Perubahan Ekonomi, Demografi, dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia pada Masa Kolonial. Khususnya materi mengenai Perkembangan Kehidupan Masyarakat pada Masa Kolonial.

#### **I.5 Metode dan Teknik Penelitian**

Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah yaitu suatu metode penelitian untuk memperoleh gambaran rekonstruksi imajinatif mengenai peristiwa sejarah pada masa lampau secara kritis dan imajinatif berdasarkan bukti-bukti dan data peninggalan masa lampau yang disebut sumber sejarah. Menurut Sjamsudin (2007:85-155) terdapat 4 tahap metode sejarah yakni sebagai berikut:

- a. Heuristik



Heuristik merupakan upaya mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan pembahasan mengenai “Kedudukan Opsir Cina dalam Pemerintahan Hindia Belanda di Batavia antara tahun 1910-1942”. Di dalam Heuristik, penulis mencoba mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dan sesuai dengan masalah yang akan diangkat oleh penulis. Sumber-sumber tersebut berupa sumber-sumber kepustakaan yang membantu penulis dalam mencari dan pengumpulan sumber. Pengumpulan sumber lainnya berupa foto, gambar, arsip serta dokumentasi lainnya juga menjadi bagian dalam pencarian dan pengumpulan sumber. Selain itu ada hasil browsing melalui internet.

b. Kritik

Tahap berikutnya dilakukan kritik atas sumber, yaitu melakukan analisis terhadap sumber yang telah diperoleh apakah sesuai dengan masalah. Pada tahap ini, kritik yang dilakukan terbagi dua yakni kritik Eksternal dan Internal. Kritik Eksternal ditujukan untuk menilai otentisitas sumber. Dalam kritik Eksternal dipersoalkan bahan dan bentuk sumber, umur dan asal dokumen, kapan dibuat, dibuat oleh siap, instansi apa, atau atas nama siapa. Dalam tahap ini penulis mencoba menilai sumber-sumber tersebut berdasarkan ketentuan dari Kritik Eksternal. Sedangkan kritik Internal lebih ditujukan untuk menilai kredibilitas sumber dengan mempersoalkan isinya, kemampuan pembuatannya, tanggung jawab dan moralnya. Pada bagian Kritik Internal ini peneliti melakukan kritik atas sumber kepustakaan yakni dengan membandingkan isi dari satu penulis buku dengan yang lainnya, sedangkan kritik atas sumber lisan lebih ditujukan kepada isi dari yang telah diungkapkan oleh saksi peristiwa terhadap masalah, sehingga fakta-fakta yang diperoleh lebih valid untuk mendukung pembahasan yang dikaji.

c. Interpretasi

Tahap berikutnya adalah proses penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh setelah proses kritik sumber dengan cara menghubungkan satu fakta dengan lainnya sehingga mendapatkan gambaran yang jelas tentang

Kedudukan Opsir Cina dalam Pemerintahan Hindia Belanda di Batavia tahun 1910-1942. Tahap ini diawali dengan melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta yang berasal dari sumber tertulis yang telah melalui fase kritik. Penulis menganalisis serta mengkaji fakta-fakta tersebut kemudian diinterpretasikan. Penginterpretasian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Di dalam interpretasi juga terdapat eksplanasi yaitu penjelasan.

#### d. Historiografi

Merupakan tahap akhir dari metode penelitian sejarah. Historiografi merupakan proses penulisan yang utuh dan masuk akal atas interpretasi dan eksplanasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Setelah sumber-sumber ditemukan, dianalisis, ditafsirkan, kemudian dituangkan ke dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi yang sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku di UPI (Universitas Pendidikan Indonesia).

Adapun teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah:

#### e. Studi Litelatur

Dalam mengumpulkan sumber yang diperlukan untuk bahan pengkajian penulisan skripsi ini. Penulis menggunakan teknik studi literatur. Studi litelatur digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan fakta dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian yang dikaji, baik literatur lokal maupun asing yang semua itu dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang hendak dikaji oleh penulis. Sumber yang dapat dikumpulkan penulis hanya sumber tertulis yang merupakan sumber sekunder. Oleh karena itu, peneliti hanya akan melakukan teknik studi litelatur ini karena telah disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji.

## **I.6 Struktur Organisasi Penulisan Skripsi**

Untuk lebih memudahkan memahami penulisan ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini penulis menguraikan beberapa pokok pemikiran yang berkaitan dengan latar belakang masalah mengenai Kedudukan Opsir Cina dalam Pemerintahan Hindia Belanda di Batavia antara tahun 1910-1942. Pada bab ini juga memuat tentang rumusan masalah yang disertai dengan pembatasan masalah. Serta membahas tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode dan teknik penelitian, serta sistematika penulisan.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penjabaran mengenai litelatur yang digunakan dan mendukung terhadap permasalahan yang dikaji, yaitu mengemukakan penjelasan beberapa sumber kepustakaan yang menjadi rujukan serta relevan dengan permasalahan yang dibahas. Kajian pustaka merupakan perangkat teoritis dalam berpikir yang berisi konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Etnis Cina di Batavia, Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda terhadap Etnis Cina dan Opsir Cina. Konsep-konsep yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti mengenai “Kedudukan Opsir Cina dalam Pemerintahan Hindia Belanda di Batavia antara Tahun 1910-1942”.

## BAB III METODE DAN PENELITIAN

Bab ini dibahas mengenai metode dan teknik penelitian yang penulis gunakan dalam mencari sumber-sumber, cara mengolah sumber, serta analisis dan cara penulisannya. Metode yang digunakan terutama adalah metode historis. Penelitian historis (*historis research*) adalah suatu usaha untuk menggali fakta dan menyusun kesimpulan dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Didukung oleh langkah-langkah penelitian yang mengacu pada proses metodologi penelitian dalam penelitian sejarah, selain itu juga menggunakan teknik literatur.

## BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini akan dibahas mengenai penjelasan hasil penelitian yang berhubungan dengan Kedudukan Opsir Cina dalam Pemerintahan Hindia Belanda di Batavia, terutama mengenai hubungan antara Opsir Cina dengan pemerintah

Hindia Belanda. Pembahasan pada bab ini mencakup kedudukan etnis Cina dalam struktur masyarakat Batavia antara tahun 1910-1942, kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap tata kehidupan masyarakat etnis Cina di Batavia antara tahun 1910-1942, perkembangan lembaga opsir Cina antara tahun 1910-1942, serta peranan lembaga opsir Cina dalam pemerintahan Hindia Belanda.

## BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dan analisis penulis terhadap masalah-masalah secara keseluruhan. Hasil temuan akhir ini merupakan pandangan dan interpretasi penulis tentang isi pembahasan penulisan.

